

ASPEK POLITIK HUKUM PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKAPENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

 Oleh: MARADEN ALIM WICAKSONO (05400146)

Law

Dibuat: 2010-06-10 , dengan 5 file(s).

Keywords: Kata kunci : Politik Hukum, Pembaharuan Undang-Undang, Kewarganegaraan, Warga Negara, Hak Asasi Manusia (HAM)

ABSTRAK

Pemenuhan hak asasi kewarganegaraan akhir-akhir ini menjadi salah satu permasalahan yang krusial dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Yang mana banyak warga negara yang belum jelas status kewarganegaraannya. Dalam tulisan ini kami mencoba menyajikan beberapa permasalahan tentang kewarganegaraan yang dititik tekankan pada status kewarganegaraan yang mengacu pada konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yang memberikan acuan terhadap segala pembaharuan undang-undang kewarganegaraan sekaligus bagaimana pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang menekankan pada kaidah-kaidah dan peraturan perundang-undangan serta dasar teori yang relevan dengan judul penulis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum sekunder yakni berupa tulisan ilmiah lainnya serta ensiklopedia sebagai pendukung untuk memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum lainnya.

Aspek politik hukum mengenai pembaharuan undang-undang kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh political will pemerintah yang berkuasa saat itu serta perubahan format ketatanegaraan Indonesia, mulai dari konstitusi UUD 1945 pra amandemen sampai pada pasca amandemen. Hal ini memberikan pengaruh pada perubahan-perubahan pengaturan tentang kewarganegaraan, dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 sampai pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Beberapa perubahan tersebut juga memberikan implikasi yuridis dalam penegakan HAM dalam ranah kewarganegaraan, yang mana perubahan demi perubahan ini memberikan kejelasan terhadap hak-hak kaum minoritas yang tertindas melalui regulasi dalam hal hak kewarganegaraan.

Pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa perjalanan hukum kewarganegaraan Indonesia mengalami progresifitas yang mana pada akhirnya lebih moderat dan universal dalam menentukan status kewarganegaraan dan pemenuhan hak-hak warga negaranya. Hal ini sejalan dengan konsepsi negara hukum yakni pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak-hak kewarganegaraan.

ABSTRACT

Fulfilling the rights of citizenship in recent years become one of the crucial problems in the lives of Indonesian state administration. Which many citizens that his citizenship is unclear. In this paper we try to present some of the problems of citizenship which focused to emphasize the status of citizenship which the constitution refers to the ever prevailing in Indonesia which provides a reference against any reform of citizenship laws as well as how the fulfillment of citizens constitutional rights.

This research is an emphasis on normative legal rules and regulations as well as the basic theory relevant to the title of author. Legal materials used consisted of primary legal materials namely regulations concerned, namely in the form of secondary legal materials written other scholarly writings as well as free as a proponent to provide guidance or clarification from other legal materials. Political aspects of the law on citizenship reform legislation is strongly influenced by the political will of the government in power at that time and the changing format of Indonesian state administration, ranging from pre-1945 constitutional amendment until after the amendment. This also write the effect on regulation changes regarding citizenship, the law number 3 of 1946 until the law number 12 of 2006. Some of these changes also have implications for the enforcement of human rights in the juridical sphere of citizenship, which amendments for these changes to clarify the rights of oppressed minorities through regulation in terms of citizenship rights.

Eventually came to the conclusion that the travel experience progression Indonesian citizenship law which is ultimately more moderate and universal in determining the citizenship status and fulfillment of the rights of citizens. This is in line with the conception of the law states that the fulfillment of human rights including the rights of citizenship.